

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriano, Reddy. "Penerapan Balanced Scorecard pada Pengukuran Kinerja Organisasi Kementerian BUMN." *Karya Akhir Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Pendidikan*, Erlangga, 2007.
- Bernard, Morard & Stancu Alexandru. *Structural Equation Modeling In A Rationalization Tentative Of Balanced Scorecard*, University of Geneva, HEC, 2005.
- Departemen Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2007.
- Depdiknas, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009.
- Anggriani, Inne. "Evaluasi Sistem Pelaporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga: Tinjauan dari aspek yuridis dan akuntabilitas", *Karya Akhir Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta, 2004.
- GAO. *Performance Budgeting Part Focuses Attention on Program Performance, but More Can Be Done to Engage Congress*, United States: Government Accountability Office, 2005.
- Hall, Matthew. *An empirical investigation of the relationship between strategic performance measurement systems, role clarity, psychological empowerment and work outcomes*, The University of Melbourne, 2004.
- IMF. *Government Finance Statistics Manual*, IMF, 2001.
- Indrayati, Ch. Iin. "Implementasi Performance Budgeting pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu," *Tesis Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2003.
- Ismail Mohammad dkk. "Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas," *Tesis Universitas Trisakti*, Jakarta, 2004.
- Kaplan, Robert S and, Norton, David P. *Strategy Maps Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes*. Unitedstates of America, Havard Business School Publishing Corporation, 2004.
- . *Balanced scorecard Translating Strategy Into Action*. Unitedstates of America: Havard Business School Publishing Corporation, 1996.

- Martin, Ben & Ammon Salter. *The Relationship Between Publicly Funded Basic Research and Economic Performance: a Spru Review*, Brighton: University of Sussex Falmer, 1996.
- Mardiasmo. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance," *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, vol 2, no.1, 2006.
- Niven, Paul R. *Balanced Scorecard step – by step for Government and non profit agencies*. Hoboken NJ: John Wiley, 2003.
- . *Balanced Scorecard step – by step: Maximizing Performance and Maintaining Results*. John Wiley & Sons, Inc, 2002.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, (2007), *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- . *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, 2006.
- Osborne, David & Ted Gaebler, (1992), *Reinventing Government How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public sector*, A Plume Book, 1992.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Acuan Umum Penerapan Good Governance pada Sektor Publik*, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2005.
- . *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi Kedua*, Jakarta: 2004.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Akuntabilitas dan Good Governance," *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, 2000.
- Robert D. Lee & Ronald W. Johnson. *Public Budgeting Systems, 6<sup>th</sup> edition*, An Aspen Publication, 1998.
- Sirajudin H Saleh & Aslam Iqbal. *Accountability*, Chapter I in a Book *Accountability The Endless Prophecy edited by Sirajudin H Saleh and Aslam Iqbal*, Asian and Pacific Development Centre, 1995.
- Solikin, Akhmad. "Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan," *Jurnal Akuntansi Pemerintah* vol. 2, No. 2, 2006.
- Syakhroza, Akhmad. *Governance for Public Expenditure Management*. Jakarta, 2008.
- . *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada perusahaan BUMN*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.

- , "Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance," *Usahawan*, 02 (02), 13–20 , 2003.
- Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. "Modul Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur, Jakarta, 2005
- Yuwono, Sony, Edy Sukari & Muchammad Ichsan. *Balanced Scorecard Menuju Organisasi yang berfokus pada strategi*, Gramedia, 2007.



## DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33/2006;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008.

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas;
28. Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PMK.02/ 2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 /PMK.05/2007 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008
30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
31. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
32. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah